
Ikhtisar Laporan
PENILAIAN NILAI KONSERVASI TINGGI

PT. Sumber Hijau Permai
Banyuasin dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Maret 2014

disiapkan oleh PT. Ekologika Consultants Untuk Konsultasi Publik



RINGKASAN IDENTIFIKASI NKT

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 – Keaneekaragaman Hayati Penting	1.1	Keaneekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	TIDAK ADA
NKT 2 – Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	ADA
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
NKT 4 – Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaanair dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan	ADA
NKT 5 –Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA
NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	ADA

DESKRIPSI LOKASI

PT Sumber Hijau Permai (SHP) memperoleh areal kerja secara definitif pada tanggal 13 Februari 2006, melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan No 29/Menhut-II/2006 dengan luas areal 30.040 ha, yang terletak di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Survei dilakukan untuk mengkaji keanekaragaman hayati dan nilai jasa lingkungan baik di dalam seluruh wilayah konsesi seluas 30.040 ha (yang terutama terdiri dari kawasan hutan, maupun yang bukan hutan alami), dan nilai-nilai sosial-ekonomi dan budaya dalam masyarakat kunci yang terletak di dalam dan sekitar kawasan konsesi.

Tim Assessment NKT melalui konsultasi kepada beberapa pihak terkait, *desktop-review* dan *kunjungan* di lapangan untuk mengkaji nilai-nilai keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, sosial-ekonomi dan budaya di sekitar dan seluruh konsesi yang disebut lanskap assessmen NKT seluas 424.289,77 ha.

Dampak potensial dari kegiatan operasional SHP sangat tinggi hal ini karena aktivitas untuk penyediaan sumber bahan baku kertas perlu menanam jenis pohon tertentu yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian lahan. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah pembukaan lahan untuk menanam jenis pohon tertentu, proses pembukaan lahan ini sangat potensial berdampak tinggi pada proses ekologis dan hidrologis yang ada. Selain itu juga akan berdampak pada kondisi keanekaragaman hayati dan kondisi sosial budaya masyarakat yang bergantung pada hutan.

Selain dampak potensial oleh operasional perusahaan dampak lain yang akan mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya berupa keberadaan ijin-ijin lain pada wilayah lanskap kawasan konsesi SHP terdapat beberapa ijin perusahaan lain bidang Kehutanan dan Perkebunan. Dua perusahaan dengan IUPHHK – HT yaitu PT Tripupa Jaya, PT Rimba Hutani Mas, Empat perusahaan Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit Swadaya Bakti Nagara Mas, Mentari Subur Abadi, Wahana Lestari Makmur Sukses dan Banyu Kahuripan Indonesia. Dampak lain yang akan mempengaruhi dalam skala lanskap berupa fenomena desa-desa sekitar kawasan konsesi SHP lebih memilih merubah sawah menjadi perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan lahan untuk berladang sehingga mereka mulai membuka sawah cetak yang berlokasi disekitar kawasan transmigrasi dan areal hutan di sekitar kawasan konsesi

Secara geografis terletak pada koordinat bumi 104°15'-104°40' BT dan 01°55'-02°15' LS Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan termasuk dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan administrasi kehutanan termasuk dalam pemangkuan hutan Dinas Kehutanan Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. Menurut pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk DAS Sembilang/Benawang terdiri dari Sub DAS Bermusimpangkiri dan Terusan Dalam. Batas – batas lokasi IUPHHK-HTI PT. Kelawit Hutani Lestari adalah :

- Sebelah Utara : Taman Nasional Sembilang
- Sebelah Timur : Taman Nasional Sembilang

!

- Sebelah Selatan : Transmigrasi Karang Agung dan PT. Banyu Kahuripan
- Sebelah Barat : Hutan Alam

URAIAN NKT DAN HASIL KAJIAN

1. NKT 1 - Nilai-nilai konsentrasi keanekaragaman hayati yang bermakna secara global, regional, ataupun nasional

NKT1.1- Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi

Identifikasi NKT 1.1

NKT	Pertanyaan Kunci	Temuan
1.1	Adakah kawasan yang berfungsi mendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi?	Ada

Hutan dalam konsesi SHP yang berpotensi mendukung keanekaragaman hayati dalam kawasan lindung dan konservasi harus diidentifikasi sebagai KBKT1.1. Fungsi pendukung adalah fungsi yang membantu menjaga populasi keanekaragaman hayati dalam hutan konservasi dan hutan lindung, dan menyangga terhadap potensi dampak negatif pengelolaan dalam konsesi. Unsur-unsur interaksi skala lanskap harus dinilai secara hati-hati untuk NKT1.1. Jika pengelolaan kawasan hutan dalam konsesi berpotensi berdampak negatif terhadap konservasi atau kawasan lindung, (dimana fungsi pendukung keanekaragaman hayati dikompromikan/dikalahkan), daerah-daerah dikonsesi ini harus diidentifikasi sebagai NKT1.1 dan rekomendasi pengelolaan diatur yang sesuai. Dampak tidak langsung, semisal peningkatan akses (melalui pembangunan infrastruktur pembalakan), dan dampak langsung (seperti perubahan hidrologi, atau gangguan konektivitas dengan kawasan konservasi atau lindung), mungkin dihasilkan dari pengelolaan yang berpandangan sempit.

Banyak hal atau faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah NKT 1.1 ada atau tidak dalam/di sekitar konsesi SHP. Keberadaan **Taman Nasional Sembilang** di timur laut yang berdekatan dengan areal konsesi, tidak diragukan sebagai pendukung keanekaragaman hayati dan ternyata, Taman Nasional Sembilang merupakan habitat bagi lebih kurang 53 jenis mamalia, diantaranya adalah harimau sumatera, ungko, berang-berang, musang air, kucing bakau dan lutung. Selain itu terdapat setidaknya 213 jenis burung seperti pecuk ular-Asia, bangau, cangk Sumatera, rangkong dan jenis-jenis burung migran. Sungai-sungai dan muara dalam Taman Nasional Sembilang merupakan habitat

!

!

buaya muara dan sinyulong. Serta menjadi habitat berbagai jenis ular dan kura-kura air tawar (Balai Taman Nasional Sembilang, 2013). Keanekaragaman di daerah konservasi penting secara global maka ditetapkan sebagai NKT 1.1 dan hutan-hutan alam tersisa sepanjang batas konsesi SHP–TN Sembilang berpotensi mendukung keanekaragaman hayati tersebut dan merupakan KBKT 1.1.

Selama kajian keanekaragaman hayati berlangsung, sempadan Sungai Sembilang disurvei. Ekosistem sempadan sungai dinyatakan kritis penting bagi keanekaragaman hayati penting (misalnya *.Excoecaria agalocha*, *Intsia bijuga*, *Ganua motleyana*, *rusa*, *monyet*, *babi* dan *harimau*) yang ditentukan sebagai NKT 1.1 dan sempadan sungai ditetapkan sebagai KBKT 1.1.

Delineasi KBKT/KPNKT 1.1

Sempadan sungai Sembilang dan buffer zone Taman Nasional Sembilang merupakan KBKT NKT 1.1, dengan KPNKT adalah areal NKT yang berada di dalam areal konsesi.

Analisis Ancaman terhadap NKT 1.1

Beberapa ancaman terhadap keberadaan NKT 1.1 antara lain:

- Kegiatan pembalakan liar- **Tinggi**
- Eksploitasi margasatwa oleh masyarakat - **Rendah**
- Ekstraksi hasil hutan pada beberapa jenis pohon dengan cara menebang pohon - **rendah**

Tujuan Pengelolaan untuk NKT1.1

Pemeliharaan fungsi dukungan atas keanekaragaman hayati dalam hutan lindung, hutan konservasi.

Rekomendasi Pengelolaan untuk NKT 1.1

Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan

Kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan dan Kepolisian) untuk upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar dan pendekatan kepada masyarakat sekitar dengan pemetaan partisipatif kawasan hutan.

Meningkatkan Pemahaman karyawan, kontraktor dan Masyarakat mengenai satwa liar

Pemahaman yang minim mengenai satwa dilindungi SHP membuat karyawan dan kontraktor berburu tanpa memperhatikan faktor ekosistem. Penyuluhan mengenai satwa liar yang dilindungi bagi karyawan dan masyarakat, serta penerapan sanksi bagi karyawan dan kontraktor yang berburu.

Pelarangan untuk Mengekstraksi Hasil Hutan dengan Cara Menebang Pohon

Hasil hutan yang sering diekstraksi seringkali diekstraksi dengan cara merusak pohonnya atau dengan cara menebang. Penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak merusak pohon saat mengambil hasil hutan dan memberlakukan sanksi pada kontraktor dan karyawan jika menebang hutan.

!

!

Menjadikan Kawasan Sempadan Sungai Area Konservasi

Area-area sempadan sungai kecil terutama sei sampan berupa semak perdu atau vegetasi suksesi awal/pionir perlu difasilitasi perkembangannya menuju hutan riparian. Penanaman spesies-spesies khas riparian terutama khas sempadan perlu husus, dilakukan. Beberapa spesies yang cocok diantaranya merbau, buta-buta dan tembesu meski memiliki pertumbuhan yang lambat. Area KPPN perlu difasilitasi dengan penanaman spesies-spesies dari hutan tua terutama spesies terancam punah, dilindungi undang-undang atau persebaran terbatas seperti Shorea leprosula, jelutung (*Dyera costulata*), merbau.

Rekomendasi monitoring untuk NKT 1.1

Keberadaaa areal hutan perlu dijaga dengan baik untuk mendukung keberadaan NKT 1.1. Kerjasama antara pihak perusahaan, dinas Kehutanan kabupaten/propinsi, kepala desa, camat dan tokoh masyarakat untuk melakukan monitoring berkala mengenai pengendalian kegiatan pembalakan liar.

Kondisi tutupan hutan di sempadan sungai dan di areal konservasi perlu dilakukan penilaian, penilaian tahunan oleh tim khusus yang terdiri dari ahli-ahli vegetasi dari Universitas lokal dan/atau dari Instansi terkait guna menilai kondisi hutan. Penilaian disarankan untuk beberapa sampling area untuk menilai tingkat kerusakan hutan dan suksesi hutan. Penilaian harus dilakukan secara berkala dengan waktu tertentu sehingga dapat memberikan data *time series* yang baik yang akan berguna bagi perbaikan rekomendasi pengelolaan.

Tabel berikut berisipemantauanyang diperlukan untukrekomendasipengelolaanspesifikyang dijelaskan di atas.

Tabel 1. Model Monitoring untuk menjaga hutan yang berisi atau menyediakan fungsi pendukung pada keanekaragaman hayati pada area yang dilindungi atau area konservasi

Tindakan yang harus diambil	Apa yang perlu diawasi	Bagaimana memantaunya?	Siapa yang akan bertanggung jawab? Kapan mereka akan melakukannya?	Bagaimana orang yang bertanggung jawab akan melaporkan temuan mereka.
Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan	Efektifitas patroli pengawasan kawasan konsesi	Patroli bersama polhut dan masyarakat	Security dibantu oleh staff lapangan	Laporan disampaikan kepada manager Forest Protection dan district manager, bila ada temuan kegiatan pembalakan liar di teruskan kepada pihak Kepolisian dan Dinas Kehutanan untuk ditindaklanjuti

!

!

Meningkatkan Pemahaman karyawan dan Masyarakat mengenai satwa liar	Efektifitas dari materi dan kesadaran masyarakat	Melihat jumlah perburuan yang terjadi	Tim Community Development dan enviroment 3 bulanan	Laporan yang didukung foto dampak dari perusahaan serta poin GPS disampaikan ke manager district untuk ditinjauan lanjuti segera.
Pelarangan untuk Mengekstraksi Hasil Hutan dengan Cara Menebang Pohon	Efektifitas dari pelarangan ekstraksi hasil hutan dengan cara menebang pohon	Laporan kegiatan patroli kawasan konsesi	Staff environment dibantu security	Laporan disampaikan kepada district manager, bila ada temuan kegiatan penebangan pohon untuk mengekstraksi hasil hutan

NKT 1.2-Spesies hampir punah

Identifikasi NKT 1.2

NKT	Kunci Pertanyaan	Temuan
1.2	Apakah terdapat area atau ekosistem yang mendukung penyelamatan individu spesies yang terancam punah (critically endangered)?	Ada

Pada ekosistem hutan gambut sekunder di wilayah SHP ditemukan adanya *Shorea guiso* yang berada dalam *red list book* IUCN (*The World Conservation Union*), dengan status kritis (*Critically Endangered*).

Gajah sumatera terdaftar dalam *red list book* IUCN (*The World Conservation Union*), dengan status kritis (*Critical Endangered*). Sementara itu CITES (*Convention on International Trade of Endangered Fauna and Flora*/Konvensi tentang Perdagangan Internasional Satwa dan Tumbuhan) telah mengkategorikan gajah sumatera dalam kelompok Appendix I. Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan gajah sumatera sebagai satwa yang dilindungi oleh undang-undang (Soehartono, *et.al.*, 2007).

Keberadaan gajah sumatera di kawasan konsesi diketahui dari hasil kamera trap tahun 2011 di Blok Brekele. Hasil pemantauan pada saat pre-assessment posisi gajah sumatra dijumpai jejak dan kotorannya di sawah-perluasan milik masyarakat desa Mulya Agung.

Terkait penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), harimau sumatera termasuk spesies yang masuk ke dalam penilaian NKT 1.2. Hasil survei menunjukkan bahwa harimau sumatera ditemukan di SHP. Keberadaan harimau sumatera di PT SHP berdasarkan hasil kamera trap, jejak kaki dan bau skresi 'urine'. Sejauh pengamatan tim survei, harimau tidak merusak tanaman akasia sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman HTI.

!

!

Harimau sumatera terdaftar dalam *red list book* IUCN (*The World Conservation Union*), dengan status kritis (*Critical Endangered*). Sementara itu CITES (*Convention on International Trade of Endangered Fauna and Flora*/Konvensi tentang Perdagangan Internasional Satwa dan Tumbuhan) telah mengkategorikan harimau sumatera dalam kelompok Appendix I. Indonesia juga telah memasukkan harimau sumatera sebagai satwa yang dilindungi oleh undang-undang.

Delineasi KBKT/KPNKT1.2

Shorea guiso jenis vegetasi yang termasuk dalam kategori *Critically Endangered*, merupakan salah satu species pada ekosistem hutan rawa gambut sekunder.

Gajah sumatera dan Harimau sumatra merupakan jenis satwa yang termasuk dalam kategori *Critical Endangered*, habitat kedua jenis satwa ini berupa hutan dataran rendah, hutan gambut, hutan tanaman, padang rumput/semak belukar dan mangrove.

Penetapan KBKT/KPNKT1.2 dilakukan dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian dan berasumsi bahwa semua mempunyai kemungkinan terdapat spesies ini. Jika survei mendatang menemukan spesies ini di luar kisaran ini, status NKT1.2 dalam konsesi dapat direvisi untuk memasukkan daerah tersebut.

Analisis Ancaman terhadap NKT 1.2

Ancaman yang dapat mempengaruhi keberadaan spesies yang sangat terancam punah NKT 1.2 dalam konsesi diberi peringkat sebagai berikut:

- Pembalakan liar - **tinggi**
- Perburuan satwa pakan - **rendah**
- Kebakaran- **rendah**

Tujuan Pengelolaan untuk NKT1.2

Tujuan dari NKT 1.2 adalah untuk melestarikan dan meningkatkan populasi spesies yang paling terancam didunia. Tujuan pengelolaan NKT 1.2 adalah perlindungan menyeluruh jenis *Shorea guiso*, Gajah Sumatera (*E. maximus sumatranus*) dan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).

Rekomendasi Pengelolaan NKT1.2

Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan

Kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan dan Kepolisian) untuk upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar dan pendekatan kepada masyarakat sekitar dengan pemetaan partisipatif kawasan hutan.

Memetakan Individu Spesies CR

Melakukan *Tagging position* dimana individu spesies CR berada di area konsesi meski dalam keadaan tegakan sisa, agar setiap individu CR diketahui keberadaannya. Individu-

!

!

individu tersebut kemudian ditandai dengan penanda yang khas (semisal plang tanam atau cat palang) dan menandakan bahwa tegakan tersebut TIDAK boleh ditebang/dipanen.

Penyelamatan Semaian *Shorea guiso*

Melakukan penyelamatan terhadap semaian. Semaian CR yang berada di daerah rawan terganggu, seperti potensial tertimpa robohan tegakan, sebaiknya dipindahkan ke area yang tidak berpotensi adanya gangguan/aman, atau dibuatkan tempat persemaian khusus

Pelarangan Berburu dan Peningkatan Pemahaman karyawan dan Masyarakat mengenai satwa liar

Pemahaman yang minim mengenai satwa dilingkungan SHP membuat karyawan dan kontraktor berburu tanpa memperhatikan factor ekosistem. Penyuluhan mengenai satwa liar yang dilindungi bagi karyawan dan masyarakat, serta peneakan sanksi bagi karyawan dan kontraktor yang berburu.

Memetakan kawasan yang rawan/potensial menimbulkan kebakaran

Meskipun ancaman kebakaran rendah di SHP, Potensi dan daerah yang rawan untuk kebakaran sangat penting untuk dipetakan agar potensi kebakaran yang akan timbul dapat diredam dengan baik.kebakaran yang terjadi dari berbagai macam penyebabnya seperti aktivitas pembukaan ladang oleh masyarakat sekitar yang tidak terkendali, musim kemarau yang berkepanjangan (contoh tahun 1982 dan 1997), dan lain sebagainya.

Rekomendasi Monitoring untuk NKT 1.2

Keberadaan *Shorea guiso* di hutan gambutharus dipantau secara berkala dari tingkat *seedling*, *sapling*, *poles* dan *tree*. Hal ini penting untuk mengetahui struktur dan komposisi jenis vegetasi sehingga dapat menganalisis kemungkinan pulihnya kembali hutan dipterocarpacea rawa gambut. Pembuatan plot tetap pada beberapa areal hutan yang telah di kukuhkan sebagai merupakan sebuah hal yang penting dilakukan dan pengamatan secara berkala penting sekali dilakukan untuk memantau perkembangan komposisi dan struktur vegetasi jenis-jenis flora sangat terancam punah. Ahli vegetasi yang berpengalaman akan dibutuhkan dan perlu waktu cukup lama di kawasan hutan untuk memantau lebih lanjut tentang spesies ini sehingga dapat mengubah rekomendasi pengelolaan dan monitoring seperlunya.

Monitoring vegetasi ini dapat dilakukan selama monitoring keanekaragaman hayati bagi spesies lainnya mengikuti NKT 1.1 dan 2.3.

Tabel berikut berisi pemantauan diperlukan untuk rekomendasi pengelolaan spesifik yang dijelaskan di atas.

Tabel 2. Model Monitoring untuk vegetasi sangat terancam punah dalam SHP

Tindakan yang harus diambil	Apa yang perlu diawasi	Bagaimana memantaunya?	Siapa yang akan bertanggung jawab? Kapan mereka akan melakukannya?	Bagaimana orang yang bertanggung jawab akan melaporkan temuan mereka.
-----------------------------	------------------------	------------------------	--	---

!

!

Pelarangan Berburu	Kebiasaan berburu masyarakat, karyawan dan kontraktor	Patroli dan pemberlakuan siste pelaporan jika terjadi pemantauan	Bulanan Tim lingkungan serta mitra lembaga konservasi	Laporan kepada manager distrik; laporan BKSDA jika terjadi perburuan
	Lokasi perlintasan individu CR (harimau sumatera)	pemasangan kamera trap di lokasi-lokasi perlintasan yang telah diketahui	Bulanan Tim lingkungan serta mitra lembaga konservasi YPHS	Laporan kepada manager distrik; laporan BKSDA jika terjadi perburuan
Memetakan Individu Spesies CR	Sebaran individu CR	Pencatatan dan penandaan tegakan CR	Tim lingkungan Tahunan	Laporan ke manager distrik disertai foto
Penyelamatan Semaian CR	Efektifitas upaya penyelamatan semaian	Pencatatan perkembangan semaian dengan survey biodiversitas dan penelitian vegetasi	tahunan tim lingkungan	Laporan disampaikan kepada distrik manager
Memetakan kawasan yang rawan/potensial menimbulkan kebakaran	Wilayah rawan kebakaran	Pengamatan titik api bersama masyarakat peduli api	tim safety bekerja sama dengan masyarakat peduli api. 6 bulan	Laporan disampaikan kepada distrik manager

NKT 1.3 – Populasi Spesies yang Terancam, Memiliki Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (*Viable Population*)

Identifikasi NKT 1.3

NKT	PertanyaanKunci	Temuan
1.3	Adakah kawasan atau ekosistem yang mendukung populasi spesies langka, atau terancam, atau sebaran terbatas, atau endemik, atau spesies yang dilindungi, atau yang perdagangannya dibatasi?	Ada

Pada kelompok flora-NKT 1.3. di SHP dijumpai 8 spesies. Sedangkan fauna-NKT 1.3. dijumpai 14 spesies mamalia, 29 spesies burung dan 6 spesies herpet.

Data yang digunakan untuk mengkaji NKT 1.3 terutama merupakan data primer dari survei

!

!

keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh tim ahli dari Ekologika. Selain Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan meranti (*Shorea platycarpa*), temuan-temuan mengenai keanekaragaman hayati yang termasuk ke dalam NKT 1.3 dijelaskan sebagai berikut:

Tumbuhan

spesies tumbuhan yang tercatat selama survei, hanya ada 18 spesies yang termasuk TTD

Tabel 3 Daftar Jenis Vegetasi-NKT 1.3 di konsesi SHP

No	Nama Indonesia	Nama Latin	Family	IUCN	CITES	UU RI	End.
1	Tanah-tanah	<i>Combretocarpus rotundatus</i>	Anisophylleaceae			v	
2	Jelutung	<i>Dyera costulata</i>	Apocynaceae	VU	App II	v	
3	Pinang merah	<i>Cyrtostachys lakka</i>	Arecaceae	VU	App II	v	
4	Merawan bunga	<i>Anisoptera marginata</i>	Dipterocarpaceae	EN			
5	Merawan	<i>Hopea mengerawan</i>	Dipterocarpaceae	CR			
6		<i>Shorea guiso</i>	Dipterocarpaceae	CR			
7	Meranti rawa	<i>Shorea platycarpa</i>	Dipterocarpaceae	CR			
8		<i>Vatica venulosa</i>	Dipterocarpaceae	CR			
9	Meranti paye	<i>Shorea teysmanniana</i>	Dipterocarpaceae	EN			
10	Merawan lilin	<i>Shorea uliginosa</i>	Dipterocarpaceae	VU			
11	Buta-but	<i>Excoecaria agalocha</i>	Euphorbiaceae			v	
12	Merbau	<i>Intsia bijuga</i>	Fabaceae	VU			
13	Semar rawa	<i>Nepenthes ampullaria</i>	Nepenthaceae	VU	App II	v	
14	Semar	<i>Nepenthes rafflessiana</i>	Nepenthaceae		App II		
15	Semar	<i>Nepenthes sp.</i>	Nepenthaceae		App II		
16	Gaharu/karas	<i>Aquilaria microcarpa</i>	Thymelacaceae	VU	App II	v	
17	Ramin	<i>Gonystylus bancanus</i>	Thymelacaceae	VU	App II	v	
18	Garubuaya, daru-daru	<i>Cantleya corniculata</i>	Stemonuraceae	VU			

keterangan : VU=Vulnerable, EN=Endangered, CR=Critically Endangered; B = PP RI No7 tahun 1999

Amfibi dan Reptil

Berdasarkan hasil survei terdapat 6 jenis reptil yang termasuk dalam NKT 1.3. Jenis-jenis tersebut terdiri atas 1 jenis terancam dan 2 jenis rentan dalam IUCN, 1 jenis appendix I dan 5 jenis appendix II dalam CITES serta 1 jenis dilindungi dalam PP RI no.7 tahun 1999. Detail jenis dan status konservasi dapat dilihat pada tabel 23.

!

Tabel 4 Jenis-jenis reptil yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi di konsesi SHP

No	Famili	Spesies	Nama Indonesia	Status IUCN	Status CITES	PP no.7/1999	Endemik
1	Crocodylidae	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara		App II	√	
2	Gavialidae	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Sinyulong, buaya sapit	EN	App I	√	
3	Geomydidae	<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	Kura-kura pipi putih	VU	App II		
4	Pythonidae	<i>Broghammerus reticulatus</i>	Sawa, sanca batik		App II		
5	Trionycidae	<i>Amyda cartilaginea</i>	Labi-labi	VU	App II		
6	Varanidae	<i>Varanus salvator</i>	Biawak, biancak		App II		

Keterangan tabel: EN=terancam; VU=rentan; App I: appendix I; App II: appendix II; tanda (√) = dilindungi; tanda (*): endemik Sumatera

Jenis-jenis NKT 1.3 yang lain seperti bunglon hutan (*Gonocephalus liogaster*) dan kura-kura duri (*Heosemys spinosa*) diduga ada di hutan dataran rendah dan hutan gambut mengacu pada konfirmasi keberadaannya di hutan dataran rendah, hutan gambut dan sungai-sungai di konsesi TPJ dan RHM yang masih satu lanskap. Sedangkan berdasar data sekunder, buaya muara (*Crocodylus porosus*) dan kura-kura gading (*Orlitia borneensis*) berpotensi ada di area konservasi dilihat dari kesesuaian tipe habitat dan sebarannya.

Jenis-jenis tersebut mampu bertahan hidup dalam habitatnya masing-masing. Keberadaan jenis-jenis tersebut didukung oleh adanya tegakan dan kanopi pepohonan (bagi jenis terrestrial dan arboreal) serta perairan (bagi jenis akuatik dan semi akuatik) yang menjadi tempat berlindung; sumber pakan dan tempat berkembang biak, baik di dalam hutan maupun di perairan; serta area yang luas yang masih mendukung daya jelajahnya.

Burung

Survei kekayaan jenis burung pada kawasan konsesi SHP di Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan pada tanggal 18-28 September 2013. Survei ini merupakan bagian dari identifikasi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi upaya pengelolaan dan monitoring lingkungan di wilayah pengelolaan hutan SHP di Kabupaten Musi Banyuasin – Sumatera Selatan. Hasil survei menunjukkan ditemukan 78 spesies burung dari 36 famili, dimana 29 spesies diantaranya adalah spesies bernilai konservasi tinggi. Metode analisis data menggunakan Indeks kesamaan Sorensen, hal ini untuk mengetahui kesamaan komunitas burung di tiap tipe habitat pada masing-masing konsesi. Tipe habitat yang teramati pada lokasi pengambilan data antara lain (1) Hutan Tanaman Industri/man-made vegetation, (2) Hutan Gambut Sekunder, (3) Belukar, dan (4) Sempadan Sungai Non-Bakau. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Indeks Kesamaan Sorensen, jenis burung yang dijumpai pada masing-masing habitat tersebut adalah berbeda.

Tabel 5 Daftar Jenis Burung di konsesi SHP

Famili	Nama Spesies		Status Konservasi			NKT
	Ilmiah	Inggris	UU	IUCN	CITES	
Accipitridae	<i>Haliastur indus</i>	Brahminy Kite	AB		II	1.3
	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	Crested Hawk-Eagle	AB		II	1.3
	<i>Elanus caeruleus</i>	Black-winged Kite	AB		II	1.3
	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	Grey-headed Fish Eagle	AB		II	1.3

	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	White-bellied Sea Eagle	AB		II	1.3
	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Crested Honey Buzzard	AB		II	1.3
Alcedinidae	<i>Halcyon smyrnensis</i>	White-throated Kingfisher	AB			1.3
	<i>Halcyon chloris</i>	Collared Kingfisher	AB			1.3
	<i>Alcedo coerulescens</i>	Cerulean Kingfisher	AB			1.3
	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret	AB			1.3
Bucerotidae	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Black Hornbill	AB	NT	II	1.3
Ciconiidae	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Lesser Adjutant	AB	VU		1.3
	<i>Treron fulvicollis</i>	Cinnamon-headed Green Pigeon		NT		1.3
	<i>Rhinomyias umbratilis</i>	Grey-chested Jungle Flycatcher		NT		1.3
Nectariniidae	<i>Leptocoma calcostetha</i>	Copper-throated Sunbird	AB			1.3
	<i>Anthreptes malacensis</i>	Brown-throated Sunbird	AB			1.3
	<i>Aethopyga siparaja</i>	Crimson Sunbird	AB			1.3
	<i>Cinnyris jugularis</i>	Olive-backed Sunbird	AB			1.3
	<i>Arachnothera longirostra</i>	Little Spiderhunter	AB			1.3
	<i>Arachnothera flavigaster</i>	Spectacled Spiderhunter	AB			1.3
Phalacrocoracidae	<i>Anhinga melanogaster</i>	Darter	AB	NT		1.3
Picidae	<i>Meiglyptes tukki</i>	Buff-necked Woodpecker		NT		1.3
Psittacidae	<i>Psittacula longicauda</i>	Long-tailed Parakeet		NT	II	1.3
	<i>Loriculus galgulus</i>	Blue-crowned Hanging Parrot			II	1.3
Rhipiduridae	<i>Rhipidura javanica</i>	Pied Fantail	AB			1.3
Strigidae	<i>Otus lempiji</i>	Collared Scops Owl			II	1.3
Timaliidae	<i>Malacopteron magnum</i>	Rufous-crowned Babbler		NT		1.3
	<i>Trichastoma rostratum</i>	White-chested Babbler		NT		1.3
Trogonidae	<i>Harpactes duvaucelii</i>	Scarlet-rumped Trogon	AB	NT		1.3

Mamalia

Dari 23 spesies mamalia yang diidentifikasi atau diduga terdapat dalam konsesi dan lanskap sekitarnya; yang kondisinya terancam, terbatas penyebarannya dan dilindungi (TTD) ada 14 spesies yang memenuhi persyaratan untuk NKT 1.3. Keberlangsungan hidup populasi dari 14 spesies yang dicatat; hanya gajah sumatera yang menggunakan kawasan konsesi SHP sebagai daerah perlintasan. Lihat Tabel 21 yang berisi daftar seluruh spesies mamalia TTD.

Tabel 6 Daftar Jenis Mamalia-NKT 1.3 di konsesi SHP

Nama Ilmiah	Nama Indonesia	STATUS KONSERVASI			
		IUCN	CITES	PP No 7/99	Endemik
<i>Elephas maximus sumatraensis</i>	Gajah Sumatera	EN	App.I	DL	
<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu	VU	App. I	DL	
<i>Hylobates agilis</i>	Owa agilis	EN	App.I	DL	
<i>Hystrix brachyura</i>	Landak	LC		DL	
<i>Lariscus insignis</i>	Bajing tanah	LC		DL	
<i>Macaca fascicularis</i>	Monyet kra	LC	App.II		

!

<i>Macaca nemestrina</i>	Beruk	VU	App.II		
<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	EN	App.I	DL	
<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau sumatera	CR	App.I	DL	
<i>Presbytis melalophos</i>	Simpai merah	EN	App.II	DL	En
<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing hutan	LC	App.II	DL	
<i>Rusa unicorn</i>	Rusa sambar	VU		DL	
<i>Sus barbatus</i>	Babi berjenggot	VU		DL	
<i>Tragulus javanicus</i>	Kancil	LC		DL	

Keberadaan Gajah Sumatera dari hasil survei diperkirakan ada sekitar 6 individu dalam populasi di lanskap SHP. Jumlah ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang menyatakan bahwa populasi gajah dilihat di dekat desa Mulya Agung mencapai 4-6 ekor. Sedangkan gajah yang *terkamera trap* di kawasan konsesi tahun 2011 jumlahnya hanya 1 ekor.

Harimau Sumatera di kawasan konsesi, berdasarkan informasi dari staf Enviro-SHP dari hasil pemantauan kamera trap 2012 oleh Yayasan Pelestarian Harimau Sumatera (YPHS) ada 5-6 individu.

Owa Agilis tergolong sebagai spesies primata yang hidup berpasangan dengan jumlah anggota 2-3 ekor dan diduga lebih dari empat kelompok berada di areal konsesi, maka diperkirakan jumlah populasinya lebih dari 12 ekor.

Delineasi KBKT/KPNKT 1.3

Delineasi KBKT dan KPNKT 1.3 berupa hutan dataran rendah, hutan gambut, hutan tanaman, padang rumput/semak belukar dan mangrove

Penetapan KBKT/KPNKT 1.3 dilakukan dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian dan berasumsi bahwa semua mempunyai kemungkinan terdapat spesies ini. Jika survei mendatang menemukan spesies ini di luar kisaran ini, status NKT1.3 dalam konsesi dapat direvisi untuk memasukkan daerah tersebut.

Analisis Ancaman terhadap NKT 1.3

Ancaman yang dapat mempengaruhi keutuhan daya hidup populasi spesies NKT 1.3- langka, atau terancam, atau sebaran terbatas, atau endemik, atau spesies yang dilindungi, atau yang perdagangannya dibatasi- yang berada di dalam dan sekitar wilayah konsesi diberi peringkat sebagai berikut:

- Perburuan liar - **Rendah**
- Pembalakan liar- **Tinggi**
- Kebakaran Hutan – **Rendah**

Tujuan Pengelolaan untuk NKT1.3

!

!

Pemeliharaan dan peningkatan daya hidup populasi semua spesies- yang langka, atau terancam, atau sebaran terbatas, atau endemik, atau spesies yang dilindungi, atau yang perdagangannya dibatasi - yang diketahui ada dalam konsesi.

Rekomendasi Pengelolaan untuk NKT 1.3

Pelarangan Berburu

Salah satu satwa yang masuk dalam NKT 1.3 adalah Harimau Sumatera. Jika terjadi perburuan satwa pakan, maka akan mengganggu kehidupan Harimau. Pemberlakuan sanksi bagi karyawan atau kontraktor jika berburu bisa membantu mengurangi kegiatan perburuan.

Meningkatkan Pemahaman karyawan dan Masyarakat mengenai satwa liar

Pemahaman yang minim mengenai satwa dilingkungan SHP membuat karyawan dan kontraktor berburu tanpa memperhatikan factor ekosistem. Penyuluhan mengenai satwa liar yang dilindungi bagi karyawan dan masyarakat, serta penerapan sanksi bagi karyawan dan kontraktor yang berburu

Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan

Kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan dan Kepolisian) untuk upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar dan pendekatan kepada masyarakat sekitar dengan pemetaan partisipatif kawasan hutan.

Membiarkan Suksesi Alami

Habitat/hutan tersisa yang menyimpan spesies NKT 1.3 atau KBKT 1.3 dibiarkan melakukan suksesi alaminya, atau tidak ada intervensi gangguan dari manusia, kecuali untuk keperluan audit, survey dan pendataan biodiversitas, dan pengelolaan konservasi habitat.

Pembentukan Masyarakat Peduli Api

Ancaman berupa kebakaran perlu mendapat perhatian khusus. Peninjauan dan peningkatan fungsi-fungsi sekat bakar diperhatikan secara khusus. pengorganisasian masyarakat peduli api, pembuatan sekat bakar di wilayah yang pernah tercatat mengalami kebakaran dengan cara penanam jenis lokal.

Rekomendasi Monitoring untuk NKT1.3

Pengamatan oleh staf SHP Lembar pencacahan sederhana keanekaragaman hayati / buku saku perlu diberikan kepada semua staf dengan merekam semua pengamatan TTD. Tim ITSP dan tim pemanen harus secara khusus didorong untuk melengkapi buku ini langsung setelah mengamati - mencatat waktu, tanggal, lokasi (nomor kilometer jalan, blok RKT dan atau nomor jalur jelajah).

Penilaian Tahunan. Universitas local atau lembaga konservasi yang ada di Sumatera Selatan harus mendokumentasikan keanekaragaman hayati dalam konsesi setidaknya dua kali dalam setahun. Banyak dari spesies TTD diidentifikasi selama penilaian yang samar dan sulit untuk mengidentifikasi dan memerlukan survei oleh para ahli dan penilaian populasi yang layak membutuhkan keahlian.

!

!

Tabel 7. Model Monitoring untuk NKT 1.3 dalam SHP

Tindakan yang harus diambil	Apa yang perlu diawasi	Bagaimana memantaunya?	Siapa yang akan bertanggung jawab? Kapan mereka akan melakukannya?	Bagaimana orang yang bertanggung jawab akan melaporkan temuan mereka.
Pelarangan Berburu	Kebiasaan berburu masyarakat, karyawan dan kontraktor	Patroli dan pemberlakuan siste pelaporan jika terjadi pemantauan	Bulanan Tim lingkungan serta mitra lembaga konservasi	Laporan kepada manager distrik; laporan BKSDA jika terjadi perburuan
	Lokasi perlintasan individu CR (harimau sumatera)	pemasangan kamera trap di lokasi-lokasi perlintasan yang telah diketahui	Bulanan Tim lingkungan serta mitra lembaga konservasi YPHS	Laporan kepada manager distrik; laporan BKSDA jika terjadi perburuan
Meningkatkan Pemahaman karyawan dan Masyarakat mengenai satwa liar	Efektivitas kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat, sangsi dan larangan berburu	Pihak staf UP TPJ telah melakukan pemantauan fauna secara berkala di area UP termasuk blok-blok Tanaman Industri. Laporan pemantauan spesies NKT dilakukan per bulan mencakup ada/tidak ada tegakan spesies NKT, kondisi, serta ancaman yang mungkin ada,	Bulanan Tim lingkungan serta mitra lembaga konservasi	Laporan kepada distrik lingkungan ; laporan kepada Dinas Kehutanan about dan BKSDA jika masyarakat tidak menyadari kepentingan spesies khas Sumatera
Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan	Pembalakan disekitar kawasan	Pemantauan dan patroli intensif (minimum 1 kali dalam sebulan) untuk menjamin tidak terjadi pembalakan liar di area konsesi, staff, polhut dan masyarakat	Tim Lingkungan, community development yang bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat. Bulanan	Laporan kepada distrik manager yang didukung foto kegiatan dan temuan untuk ditindak lanjuti
Mebiarkan Suksesi Alami	Adanya spesies invasiv	Melakukan survey biodiversitas dan kehadiran spesies invasif di dalam area konservasi.	Tahunan. Tim lingkungan	Laporan kepada distrik lingkungan dilengkapi dengan foto sebagai bukti temuan

!

!

Memetakan kawasan yang rawan/potensial menimbulkan kebakaran	Wilayah rawan kebakaran	Pengamatan titik api bersama masyarakat peduli api	bulanan tim safety bekerja sama dengan masyarakat peduli api	Laporan disampaikan kepada distrik manager
Pembentukan Masyarakat Peduli Api	Efektifitas kegiatan masyarakat peduli api	Patroli terutama saat musim kemarau	Tim Lingkungan bersama masyarakat peduli api	Laporan kepada Manager Lingkungan

NKT1.4- Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer

Identifikasi NKT 1.4

NKT	PertanyaanKunci	Temuan
1.4	Adakah kawasan yang ditinggali secara temporer oleh spesies atau sekumpulan spesies pada musim tertentu, atau pada siklus-hidup tertentu?	Tidak Ada

Selama survei lapangan yang dilakukan tidak ditemukan wilayah yang merupakan habitat kunci penting untuk populasi musiman, kadang-kadang ada, ataupun selama tahap tertentu dalam hidup mereka.

NKT 2 – Lanskap dan Dinamika Alamiah

NKT 2.1 – Bentang Lahan Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami.

Identifikasi NKT 2.1

NKT	Pertanyaan Kunci	Temuan
2.1	Apakah terdapat lanskap alami pecahan hutan yang luasnya >20.000 ha yang dikelilingi oleh wilayah penyangga selebar 3 km?	Ada

!

!

Luas kawasan konsesi SHP seluas 30.040 ha ha, sedangkan lanskap kajian luasnya 424.189 kondisi tutupan lahannya bervariasi berupa hutan sekunder, belukar muda, hutan tanaman, perkebunan belukar tua, semak belukar, hutan mangrove dan lahan terbuka. Sisi utara dan timur laut dari areal lanskap kajian merupakan sisa ekosistem alami yang lebih dari 20.000 ha. Lanskap alami NKT 2.1 terbentang pada sisi utara dan timur laut wilayah lanskap kajian, masih terdapat sisa ekosistem alami yang berupa hutan sekunder, belukar muda, belukar tua, semak belukar dan hutan mangrove seluas 98.577,5 ha sebagai areal inti dan zona penyangga selebar 3 km seluas 65.851 ha.

Deliniasi KBKT/KPNKT 2.1

Seluruh ekosistem alami yang berada di dalam lanskap yang lebih dari 20.000 ha merupakan dengan wilayah buffer 3 km dari areal non alami ditetapkan sebagai KBKT 2.1. Areal KPNKT 2.1 adalah seluruh areal KBKT yang berada di dalam kawasan konsesi.

Analisis Ancaman NKT 2.1

Ancaman yang dapat mempengaruhi integritas lanskap NKT 2.1 adalah sebagai berikut :

- Fragmentasi ekosistem alami - **Tinggi**
- Pembalakan liar – **Tinggi**

Rekomendasi Pengelolaan NKT 2.1

Kerjasama Pengelolaan Lanskap

SHP disarankan melakukan pendekatan secara proaktif kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan pada lanskap untuk mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan yang kolaboratif di tingkat lanskap, yang menjangkau keluar batasan konsesi. Langkah ini mungkin memerlukan kerjasama dengan badan pemerintah perencana tata ruang dan pihak lain yang dapat secara langsung mempengaruhi ukuran dan kesinambungan lanskap, dan dengan demikian pada jangka panjang menjaga populasi spesies yang umum terdapat di sana. Salah satu pihak yang berkepentingan dalam lanskap ini adalah Unit Pengelola Teknis TN Sembilang

Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan, Penegakkan Hukum dan Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami

Penjagaan hutan bersama masyarakat untuk meminimalisir pembalakan liar, sehingga bias meminimalisir gangguan akibat jalur logging. Kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan dan Kepolisian) untuk upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar dan pendekatan kepada masyarakat sekitar dengan pemetaan partisipatif kawasan hutan.

Tabel 8. Model Monitoring untuk NKT 2.1 dalam SHP

!

!

Tindakan yang harus diambil	Apa yang perlu diawasi	Bagaimana memantaunya?	Siapa yang akan bertanggung jawab? Kapan mereka akan melakukannya?	Bagaimana orang yang bertanggung jawab akan melaporkan temuan mereka.
Melakukan pengelolaan kolaboratif kawasan lanskap dengan pemangku kepentingan yang lain (Masyarakat sekitar, Pemilik perijinan lain dan Dinas terkait)	Pelaksanaan sharing responsibility dalam pengelolaan kawasan	Laporan kegiatan masing-masing pihak	Tim lingkungan dan CD 6 bulan	Laporan disampaikan kepada distrik manager Forest Protection dan district manager, bila ada temuan
Mengendalikan pembalakan liar pada kawasan hutan	Pembalakan disekitar kawasan	Pemantauan dan patroli intensif (minimum 1 kali dalam sebulan) untuk menjamin tidak terjadi pembalakan liar di area konsesi, staff, polhut dan masyarakat	Tim Lingkungan, community development yang bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat. Bulanan	Laporan kepada distrik manager yang didukung foto kegiatan dan temuan untuk ditindak lanjuti

NKT 2.2 – Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)

Identifikasi NKT

NKT	Pertanyaan Kunci	Temuan
2.2	Apakah terdapat kawasan peralihan dua/lebih ekosistem bersebelahan dan berbagi batas (<i>ecotone</i>) atau kawasan peralihan dua/lebih ekosistem bersebelahan dan berbagi batas ketinggian (<i>ecocline</i>)– yang penting untuk menjaga konektivitas antara dua/lebih tipe ekosistem utama?	Ada

Tim survei menemukan beberapa tipe habitat di dalam wilayah konsesi seperti hutan alam, kebun tanaman, hutan bakau, dan wilayah semak belukar. Habitat hutan alam didominasi oleh beberapa jenis palmae seperti Nibung (*Oncosperma* spp.), dan jenis pohon lain seperti Gelam (*Melaleuca* spp.), Nipah (*Nypa fruticans*) dan pohon beringin/ara (*Ficus* sp). Hutan alam tersebut umumnya dijumpai pada wilayah konsesi hutan lindung dan beberapa wilayah cadangan air. Hutan bakau ditemukan di wilayah bagian luar konsesi yang berbatasan dengan laut lepas ataupun muara sungai yang didominasi oleh beberapa jenis pohon bakau seperti *Rhizophora* sp., api-api (*Avicennia* sp.) dan kendea (*Bruguiera* sp.). Di wilayah

!

!

semak belukar, umumnya didominasi oleh beberapa jenis rumput dan alang-alang dan diselingi oleh beberapa pokok kayu Gelam atau Rengas (*Gluta renghas*).

Ekosistem riparian didominasi oleh spesies tumbuhan nipah dan di beberapa lokasi berbatasan langsung dengan ekosistem rawa yang didominasi oleh belukar rawa.

Deliniasi KBKT/KPNKT 2.2

Wilayah sempadan merupakan ecotones dari bakau dengan hutan dataran rendah di sempadan Sungai Sembilang

Analisis Ancaman NKT 2.2

Ancaman yang dapat mempengaruhi integritas lanskap NKT 2.2 adalah sebagai berikut :

- ✓ **Konversi wilayah dalam lanskap dalam batas konsesi - Rendah**
- ✓ **Fragmentasi oleh kegiatan pengambilan kayu - Tinggi**

Tujuan Pengelolaan KBKT 2.2

Tutupan hutan alami dengan derajat konektivitas tinggi yang mendukung untuk terus terus berlangsungnya proses pengukuran skala lanskap dipertahankan di dalam KBKT 2.2 dalam ecotones lanskap.

Rekomendasi Pengelolaan NKT 2.2

Tidak melakukan pembukaan wilayah (Land Clearing) di areal sempadan sungai yang ditetapkan sebagai KBKT 2.2

Areal sempadan sungai sembilang merupakan wilayah dengan ekosistem bakau yang langsung berbatasan dengan ekosistem hutan dataran rendah.

Mengendalikan pembalakan liar di kawasan hutan

Kerjasama dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan dan Kepolisian) untuk upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar sehingga dapat meminimalisir fragmentasi akibat jalur logging.

Rekomendasi Pemantauan NKT 2.2

Sebagaimana di NKT 2.1, pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi penginderaan jauh dengan pemeriksaan silang tambahan di lapangan untuk menilai Kondisi ecotone. Citra satelit terkini dapat menentukan apakah telah terjadi fragmentasi SHP dalam NKT 2.2; pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan ancaman terhadap keutuhan ecotones tetap terjaga.

!

!

Tabel 9. Model Monitoring NKT 2.2 SHP

Tindakan yang harus diambil	Apa yang perlu diawasi	Bagaimana memantaunya?	Siapa yang akan bertanggung jawab? Kapan mereka akan melakukannya?	Bagaimana orang yang bertanggung jawab akan melaporkan temuan mereka.
Tidak melakukan pembukaan wilayah (Land Clearing) di areal sempadan sungai yang ditetapkan sebagai KBKT 2.2	Kegiatan <i>land clearing</i> di sekitar di areal sempadan sungai serta patok batas wilayah sempadan sungai	Pantauan langsung di lapangan didaerah yang dapat dikunjungi	Tim Lingkungan. Tahunan	Laporan yang didukung foto dampak dari perusahaan serta poin GPS disampaikan ke manager district untuk ditinjauan lanjuati segera.
Penegakkan hukum untuk mengendalikan pembalakan liar	Efektifitas dari penegakkan hukum	Patrol bersama penegak hukum	Tim lingkungan dan instansi terkait. Bulanan	Laporan kepada manager lingkungan disertai foto temuan

NKT 2.3 – Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies

Identifikasi NKT 2.3

NKT	Pertanyaan Kunci	Temuan
2.3	Apakah terdapat kawasan yang memiliki kapasitas untuk mendukung populasi spesies-spesies alami yang mampu bertahan hidup?	Ada

Habitat hutan gambut yang ada di konsesi SHP menjadi habitat penting bagi jenis *Harpactes duvaucelii*. Dalam Redlist IUCN habitat alami jenis ini merupakan hutan mineral dataran rendah hingga rawa. Ditemukannya *Harpactes duvaucelii* di habitat hutan gambut dikarenakan pada konsesi SHP habitat hutan mineral tidak terlalu luas.

Selama survei di lapangan, tim berhasil menemukan beberapa spesies mamalia besar seperti Harimau Sumatera. Keberadaan harimau Sumatera di SHP diketahui dari penemuan jejak kaki; didengar langsung suaranya dan penuturan dari warga sekitar konsesi. Monyet ekor panjang ditemukan di Distrik Lebong Hitam dan Teluk Pulau, sedangkan simpai hanya ditemukan di Distrik Lebong Hitam. Indikasi kehadiran dan keberadaan spesies itu didapatkan dengan cara melihat langsung, jejak, kotoran, dan sisa pakan.

!

!

Spesies mamalia besar yang tercatat dalam survei ini, ditemukan pada beberapa tipe habitat, seperti: hutan dataran rendah, hutan gambut, blok tanaman akasia dan sempadan sungai. Kehadiran gajah ditemukan di Blok Brekele dan urutan berikutnya terdapat di sepanjang sungai-kanal. Monyet ekor panjang ditemukan pada tepi HTI akasia.

Luasan konsesi HTI yang saling terhubung, memungkinkan pergerakan satwa liar lain keseluruh wilayah konsesi. Kondisi area konsesi yang aman dari kegiatan perburuan, terdapat di blok tanam akasia usia 2-5 tahun diduga memberikan andil positif bagi kehidupan spesies satwa liar. Keberadaan hutan alami di dalam konsesi itu dapat digolongkan sebagai hutan bernilai konservasi tinggi karena menjadi habitat yang mendukung populasi harimau dan satwa liar lainnya. Hasil survei lapangan menunjukkan harimau sumatera dapat bertahan hidup.

Deliniasi KBKT/KPNKT 2.3

Keanekaragaman satwa, terutama mamalia ditemukan di semua hutan gambut, hutan dataran rendah dan belukar. Semua hutan gambut, hutan dataran rendah dan belukar di dalam lanskap penilaian NKT harus dianggap sebagai NKT 2.3. Oleh karena itu KPNKT 2.3 meliputi SEMUA ekosistem hutan gambut dalam konsesi.

Analisa Ancaman Terhadap NKT 2.3

Ancaman yang dapat mempengaruhi integrasi Lanskap NKT 2.3 mirip dengan NKT 2.1 dan 2.2 tetapi dalam hal kawasan hutan dalam batas-batas konsesi :

- Pembalakan Liar **-Tinggi**
- Gangguan akibat pemanenan **–TINGGI**

Tujuan Pengelolaan KBKT 2.3

Lanskap Integral yang mendukung populasi yang mewakili spesies yang paling alami dipertahankan.

Rekomendasi Pengelolaan NKT 2.3

Rekomendasi pengelolaan untuk nilai lanskap menurut KBKT 2.1 dan 2.2 juga berlaku untuk KBKT 2.3. Mempertahankan lanskap yang dapat mendukung kumpulan spesies alami pada dasarnya membutuhkan mempertahankan tutup hutan, konektivitas, dan menghindari dalam fragmentasi dalam lanskap.

Beberapa rekomendasi pengelolaan NKT 2.3 yang dapat disampaikan adalah:

Penegakkan Hukum dan Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami

Penjagaan hutan bersama masyarakat untuk meminimalisir pembalakan liar. Memastikan perlindungan 100% hutan alami yang menjadi bagian kawasan lindung dalam area konsesi sebagai satu-satunya tempat berlindung, dan variasi pakan utama harimau;

Pengayaan Habitat

!

!

Pengayaan habitat untuk sumber pakan mangsa harimau yang lebih baik di *home range* harimau (berdasarkan data perjumpaan harimau), dengan membiarkan tumbuhan bawah (lantai hutan).

Pengembangan Mekanisme Pemantauan Pra-Pemanenan

Mengembangkan mekanisme pemantauan pra-pemanenan untuk mendeteksi keberadaan harimau yang menggunakan konsesi akasia usia panen. Pemanenan bisa dilakukan jika harimau telah berpindah ke lokasi yang lain tanpa diganggu/pengusiran;

Penekanan Perencanaan RKU dan RKT

Penekanan yang lebih besar harus ditempatkan pada perencanaan RKU atau RKT pentingnya saran ahli dalam membantu penempatan kawasan lindung dan plot permanen pemantauan satwa liar yang aman dari kegiatan pemanenan kayu. Blok-blok hutan atau ekosistem alami ini dapat berperan untuk mempertahankan konektivitas dan mosaik habitat alami dalam berbagai ekosistem di seluruh konsesi sehingga berperan penting dalam membantu mempertahankan populasi keseluruhan spesies alami.

Kerjasama Pengelolaan Lanskap

SHP disarankan melakukan pendekatan secara proaktif kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan pada lanskap untuk mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan yang kolaboratif di tingkat lanskap, yang menjangkau keluar batasan konsesi. Langkah ini mungkin memerlukan kerjasama dengan badan pemerintah perencana tata ruang dan pihak lain yang dapat secara langsung memengaruhi ukuran dan kesinambungan lanskap, dan dengan demikian pada jangka panjang menjaga populasi spesies yang umum terdapat di sana.

Rekomendasi Pemantauan NKT 2.3

Untuk memonitor hutan pada lanskap, dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi penginderaan jauh dengan pemeriksaan silang tambahan di lapangan untuk menilai gangguan keadaan pasca-panen. Citra satelitterkini dapat menentukan apakahtelah terjadi fragmentasi di dalam konsesi SHP dalam NKT2.3; pengecekan lapangan digunakan jika tidak tersedia gambar yang bebas awan. Proksi tersebut harus dimonitor secara berkala untuk menjamin bahwa lanskap tersebut masih utuh dan dapat mendukung perwakilan species alami

Kerjasama dengan perusahaan pemilik ijin yang lain dalam skala lanskap untuk melakukan monitoring bersama kawasan yang menjadi perbatasan antar wilayah perijinan guna menghindari fragmentasi hutan dalam lanskap

Tabel 10 Model Monitoring Untuk NKT 2.3 SHP

Tindakan yang harus diambil	Apa yang perlu diawasi	Bagaimana memantaunya?	Siapa yang akan bertanggung jawab? Kapan mereka akan melakukannya?	Bagaimana orang yang bertanggung jawab akan melaporkan temuan mereka.
Penegakkan Hukum dan Penetapan	Pembalakan di Area yang dijadika kawasan lindung	Patroli secara periodik	Bulanan Tim lingkungan kerjasama	Melaporkan pada manajer lingkungan disertai dengan foto

!

!

Kawasan Lindung Pada Hutan Alami			dengan instansi terkait	hasil temuan untuk ditindaklanjuti
Menghindari Gangguan Akibat Pemanenan	Kegiatan pemanenan	Pemeriksaan pada lahan untuk memantau status aktivitas. Pemantauan terhadap kondisi spesies langka Evaluasi SOP pengelolaan hutan	Tim Perencana, dan tim pemanenan tahunan.	Melaporkan pada manajer produksi, lingkungan, dan pengembangan masyarakat untuk melembagakan tindakan perbaikan yang diperlukan.
Melakukan pengelolaan kolaboratif kawasan lanskap dengan pemangku kepentingan yang lain (Masyarakat sekitar, Pemilik perijinan lain dan Dinas terkait)	Pelaksanaan sharing responsibility dalam pengelolaan kawasan	Laporan kegiatan masing-masing pihak	Tim lingkungan dan CD 6 bulan	Laporan disampaikan kepada distrik manager Forest Protection dan district manager, bila ada temuan

NKT3 – Ekosistem Langka atau terancam Punah

Mengidentifikasi NKT 3

NKT	Pertanyaan Kunci	Temuan
3	Apakah terdapat kawasan yang merupakan ekosistem langka atau terancam punah?	Ada

Suatu pendekatan "nasional" telah dikembangkan oleh NKT (Paoli and Wells, 2009). Mengikuti metoda tersebut telah disusun proxy ekosistem oleh tim penyusun HCV toolkit untuk seluruh Sumatera dan Kalimantan. Sehingga untuk identifikasi keberadaan ekosistem langka atau terancam di areal konsesi SHP, dilakukan dengan menggunakan data peta proxy ekosistem tersebut.

Ekosistem yang memenuhi satu atau lebih dari kriteria berikut dapat dianggap terancam dalam definisi NKT 3:

1. dalam suatu unit bio-fisiogeografis suatu ekosistem sudah mengalami kehilangan 50% atau lebih dari luas semulanya
2. dalam suatu unit bio-fisiogeografis terdapat ekosistem yang akan mengalami kehilangan 75% atau lebih dari luas semulanya berdasarkan asumsi semua kawasan konversi dalam tataruang yang berlaku dapat dikonversikan
3. karena faktor alami atau manusia ekosistem alami mencakup kurang dari 5% luas areal total suatu unit bio-fisiografis.

!

!

Di wilayah SHP, terdapat banyak ekosistem yang terganggu dan rusak oleh kegiatan sebelum hutan tanaman Industri terbangun maupun oleh kegiatan ilegal saat ini. Dengan demikian, NKT 3 ditetapkan hanya dalam ekosistem langka atau terancam yang masih memiliki daya regenerasi alami. Hal ini dapat diukur melalui kajian vegetasi di berbagai penutupan lahan yang ditemukan dalam konsesi SHP.

Di dalam areal konsesi SHP terdapat 3 ekosistem yang masuk kategori terancam yaitu:

- Ekosistem rawa mangrove dan rawa pasang surut,
- Ekosistem rawa gambut
- Hutan dataran rendah (dipterocarp) pada tanah aluvium

Deliniasi KBKT/KPNKT 3

Seluruh Ekosistem rawa mangrove dan pasang surut, Ekosistem rawa gambut, Ekosistem hutan dipterocarp dan riparian forest adalah KPNKT 3

Tujuan Pengelolaan NKT 3

Ekosistem proxy yang langka dan terancam punah dipertahankan dan tidak dikonsversi menjadi penggunaan lahan lainnya.

Analisis Ancaman Terhadap NKT 3

- Pembukaan Lahan-rendah
- Aktivitas transportasi balok kayu - Tinggi

Rekomendasi Pengelolaan NKT 3

Rekomendasi utama yang dapat dikelola oleh SHP adalah operasi penebangan kayu yang berdekatan dengan ekosistem langka atau terancam. Beberapa rekomendasi pengelolaan yang dapat dilakukan antara lain :

Kerjasama Pengelolaan Lanskap

SHP disarankan melakukan pendekatan secara proaktif kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan pada lanskap untuk mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan yang kolaboratif di tingkat lanskap, yang menjangkau keluar batasan konsesi. Langkah ini mungkin memerlukan kerjasama dengan badan pemerintah perencana tata ruang dan pihak lain yang dapat secara langsung mempengaruhi ukuran dan kesinambungan lanskap, dan dengan demikian pada jangka panjang menjaga populasi spesies yang umum terdapat di sana.

Penegakkan Hukum dan Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami

Penjagaan hutan bersama masyarakat untuk meminimalisir pembalakan liar, sehingga bias meminimalisir gangguan akibat jalur logging. Memastikan perlindungan 100% ekosistem langka .

!

Rekomendasi Pemantauan NKT 3

Untuk memonitor hutan pada lanskap, dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi penginderaan jauh dengan pemeriksaan silang tambahan di lapangan untuk menilai gangguan keadaan. Pengecekan lapangan digunakan jika tidak tersedia gambar yang bebas awan. Proksi tersebut harus dimonitor secara berkala untuk menjamin bahwa lanskap tersebut masih utuh dan dapat mendukung perwakian species alami

Kerjasama dengan perusahaan pemilik ijin yang lain dalam skala lanskap untuk melakukan monitoring bersama kawasan yang menjadi perbatasan antar wilayah perijinan guna menghindari fragmentasi hutan dalam lanskap

Water level manajemen harus diterapkan harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan, yang berarti UMH harus tetap menjaga kondisi air di wilayah kerja tetap tinggi. Pembuatan kanal bias mengeringkan air tanah di gambut, yang bias berakibat pada intrusi air laut.

Tabel 11 Model Pengelolaan NKT 3 SHP

Tindakan yang harus diambil	Apa yang perlu diawasi	Bagaimana memantaunya?	Siapa yang akan bertanggung jawab? Kapan mereka akan melakukannya?	Bagaimana orang yang bertanggung jawab akan melaporkan temuan mereka.
Menjaga air tanah tetap tinggi	Tinggi air tanah	Pemeriksaan tinggi air tanah terutama di wilayah gambut.	Tim Lingkungan Setahun2x, terutama pada perbedaan musim	Melaporkan pada manager lingkungan
Melakukan pengelolaan kolaboratif kawasan lanskap dengan pemangku kepentingan yang lain (Masyarakat sekitar, Pemilik perijinan lain dan Dinas terkait)	Pelaksanaan sharing responsibility dalam pengelolaan kawasan	Laporan kegiatan masing-masing pihak	Tim lingkungan dan CD 6 bulan	Laporan disampaikan kepada distrik manager Forest Protection dan district manager, bila ada temuan
Penegakkan Hukum dan Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami	Transportasi logging	Patroli secara periodik	Bulanan Tim lingkungan kerjasama dengan instansi terkait	Melaporkan pada manajer lingkungan disertai dengan foto hasil temuan untuk ditindaklanjuti

NKT 4 – Jasa Lingkungan

NKT 4.1 – Jasa Penyediaan Air dan Pencegahan Banjir untuk Masyarakat Hilir

!

Identifikasi dan Delineasi NKT 4.1

NKT	Pertanyaan Kunci	Temuan
4.1	Apakah terdapat ekosistem yang penting untuk pemeliharaan Air bersih dan pencegahan banjir?	Ada

Para penkangku kepentingan di APP, SMF dan mitranya mengatakan bahwa daerah gambut berfungsi sebagai *reservoir* dan mampu menahan air cukup substansial. Namun tanaman pokok di gambut membutuhkan drainase sehingga hidrologi gambut terganggu dan dapat mengakibatkan banjir saat ini karena kanal-kanal yang dibuat perusahaan mengakibatkan yang keluar menuju Sungai Sembilang menjadi lebih tinggi intensitasnya. Karena, jarak dari konsesi ke laut tidak jauh, pengaruh pasang surut terhadap sungai lebih besar dari pengaruh air dari kawasan gambut.

Riparian forest dan lahan basah ditemukan sepanjang Sungai Sembilang dibagian tengah selatan konsesi menjadi NKT 4.1. Sungai ini adalah besar yang mengalir langsung ke laut. Sempadan sungai ditentukan di atas berasal dari Keputusan Presiden 32/1990. Rincian pada lebar dalam keputusan ini tidak jelas sehingga terbuka untuk interpretasi. Namun dataran banjir terlihat dengan jelas lebih dari 50m, sehingga batas sempadan harus ditambahkan.

Penyediaan sempadan di hulu DAS akan mempengaruhi pemeliharaan kualitas air dibandingkan sempadan di sungai bagian hilir karena sebagian besar air telah masuk badan airnya dan memiliki sedikit interaksi dengan sempadan dan vegetasinya. Namun demikian, masyarakat sekitar SHP menggunakan air bersih dari hujan atau membelinya, sehingga sub-DAS yang ditemukan di desa-desa transmigrasi di selatan tidak termasuk penting untuk mengatur hidrologi dan menyediakan air bersih. Karena daerah tersebut termasuk daerah rawa pasang-surut, maka laut mempengaruhi jauh lebih besar daripada aliran air dari sub-DAS dalam hal pengaturan hidrologi.

Ditemukannya mata air artesis yang berada di dalam area SHP. Sumber air ini menjadi sumber air minum utama bahkan bagi masyarakat sekitar ketika musim kemarau terjadi.

Deliniasi KBKT/KPNKT 4.1

Areal hutan gambut dan sempadan sungai dan mata air di SHP

Analisis Ancaman Terhadap NKT 4.1

- Dranase / Pengeringan air gambut - RENDAH
- Fragmentasi Sempadan sungai –MENENGAH

!

!

Tujuan Pengelolaan NKT 4.1

Seluruh area riparian dan gambut penting untuk pengaturan proses hidrologi di seluruh lanskap.

Rekomendasi Pengelolaan NKT 4.1

Rekomen ancaman utama yang dapat dikelola oleh SHP adalah operasi penebangan kayu yang berdekatan dengan ekosistem langka atau terancam. Beberapa rekomendasi pengelolaan yang dapat dilakukan antara lain :

Penegakkan Hukum dan Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami

Penjagaan hutan bersama masyarakat untuk meminimalisir pembalakan liar. Memastikan perlindungan 100% pada daerah penyangga proses hidrologi

Menjaga air tanah tetap tinggi

Pembuatan drainase di wilayah gambut agar tetap memperhatikan tinggi air tanah. Dengan tidak membuat kanal baru dan membuka lahan diharapkan bias tetap menjaga tinggi air tanah.

Kerjasama Pengelolaan Lanskap

SHP disarankan melakukan pendekatan secara proaktif kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan pada lanskap untuk mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan yang kolaboratif di tingkat lanskap, yang menjangkau keluar batasan konsesi. Langkah ini mungkin memerlukan kerjasama dengan badan pemerintah perencana tata ruang dan pihak lain yang dapat secara langsung memengaruhi ukuran dan kesinambungan lanskap, dan dengan demikian pada jangka panjang dapat menjaga kondisi tutupan lahan terutama di sempadan sungai.

Rekomendasi Pemantauan NKT 4.1

Untuk memonitor hutan pada lanskap, dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi penginderaan jauh dengan pemeriksaan silang tambahan di lapangan untuk menilai gangguan keadaan. Pengecekan lapangan digunakan jika tidak tersedia gambar yang bebas awan. Proksi tersebut harus dimonitor secara berkala untuk menjamin bahwa lanskap tersebut masih utuh dan dapat mendukung perwakian species alami

Kerjasama dengan perusahaan pemilik ijin yang lain dalam skala lanskap untuk melakukan monitoring bersama kawasan yang menjadi perbatasan antar wilayah perijinan guna menghindari pembukaan lahan di area sempadan sungai

Water level manajemen harus diterapkan harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan, yang berarti UMH harus tetap menjaga kondisi air di wilayah kerja tetap tinggi. Pembuatan kanal bias mengeringkan air tanah di gambut, yang bias berakibat pada intrusi air laut.

!

!

Tabel 12 Model Pengelolaan NKT 4.1 SHP

Tindakan yang harus diambil	Apa yang perlu diawasi	Bagaimana memantaunya?	Siapa yang akan bertanggung jawab? Kapan mereka akan melakukannya?	Bagaimana orang yang bertanggung jawab akan melaporkan temuan mereka.
Menjaga air tanah tetap tinggi	Tinggi air tanah	Pemeriksaan tinggi air tanah terutama di wilayah gambut.	Tim Lingkungan Setahun2x, terutama pada perbedaan musim	Melaporkan pada manager lingkungan
Melakukan pengelolaan kolaboratif kawasan lanskap dengan pemangku kepentingan yang lain (Masyarakat sekitar, Pemilik perijinan lain dan Dinas terkait)	Pelaksanaan sharing responsibility dalam pengelolaan kawasan	Laporan kegiatan masing-masing pihak Pemantauan vegetasi diwilayah sempadan	Tim lingkungan dan CD 6 bulan	Laporan disampaikan kepada distrik manager Forest Protection dan district manager, bila ada temuan
Penegakkan Hukum dan Penetapan Kawasan Lindung Pada Hutan Alami	Transportasi logging	Patroli secara periodik	Bulanan Tim lingkungan kerjasama dengan instansi terkait	Melaporkan pada manager lingkungan disertai dengan foto hasil temuan untuk ditindaklanjuti

NKT 4.2 – Jasa Pencegahan Erosi dan Sedimentasi

Identifikasi dan Deliniasi NKT 4.2

NKT	Pertanyaan Kunci	Temuan
4.2	Apakah terdapat ekosistem yang penting untuk pencegahan erosi tanah dan sedimentasi yang berlebihan?	Tidak Ada

Sebagian besar areal konsesi SHP merupakan daerah dataran rendah dan didominasi gambut. Kurang lebih 99% wilayah konsesi memiliki topografi antara 0-5% dengan kategori landai. Sehingga daerah demikian diperkirakan tidak rawan terhadap bencana erosi. Berdasarkan wawancara dengan staf perusahaan dan juga masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar konsesi, tidak pernah ada kejadian erosi di areal konsesi.

NKT 4.3 – Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan

!

!

Identifikasi dan Deliniasi NKT 4.3

NKT	Pertanyaan Kunci	Temuan
4.3	Apakah terdapat ekosistem yang penting untuk pencegahan menyebarnya kebakaran hutan atau lahan?	Ada

Dari hasil penelitian di lapangan dan hasil wawancara dengan warga desa dan karyawan. Selama beroperasinya PT. SHP belum pernah terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi saat sebelum PT. SHP beroperasi.

Dari peta hotspot ditemukan beberapa titik yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Untuk memperkecil resiko kebakaran tersebut, perusahaan harus memiliki sekat bakar.

Analisis Ancaman Terhadap NKT 4.3

Peningkatan risiko kebakaran oleh penebangan yang dekat dengan tepi hutan yang berbatasan dengan jenis tumbuhan semak, non- hutan dan kawasan perladangan masyarakat-**Sedang**

Tujuan Pengelolaan untuk NKT 4.3

Hutan yang penting untuk pencegahan penyebaran api (ke dalam hutan NKT dari padang rumput maupun semak yang bernilai konservasi rendah) dilindungi untuk meminimalkan ancaman kebakaran.

Pengelolaan NKT 4.3

Pembuatan Sekat Bakar/Hutan Penyangga

Untuk meminimalisir dampak kebakaran di kawasan areal kerja SHP, perusahaan wajib membuat sekat bakar alami yang mengelilingi konsesi. Pembuatan sekat bakar berupa buffer yang mengelilingi konsesi selebar 500m. Jika wilayah yang ditetapkan sebagai hutan penyangga adalah petak tanaman pokok, maka tanaman pokok yang masuk dalam rekomendasi tidak boleh ditebang. Untuk wilayah yang kondisinya terbuka, perusahaan wajib melakukan penanaman dengan jenis local.

Mengoptimalkan kelompok Masyarakat Peduli Api

Bekerjasama dengan masyarakat sangatlah penting untuk mencegah kehilangan hutan karena kebakaran hutan yang dapat terjadi seperti yang pada tahun 1997. Strategi pengelolaan kebakaran utama adalah persiapan tim serbu api agar menghentikan api dan hilangnya hutan. Namun pengelolaan tambahan wilayah hutan yang dekat padang rumput akan memperkuat strategi pengelolaan kebakaran tersebut.

!

Rekomendasi Monitoring untuk NKT 4.3

Batas Penyangga yang jelas dapat ditempatkan berdasarkan blok RKT, namun tidaklah perlu untuk ditetapkan batas-batasnya di lapangan di konsesi keseluruhan. Monitoring hutan penyangga ini harus dilakukan setelah penebangan untuk mengukur efektivitas penyangga, dan mengkaji apakah lebab yang lebih besar harus diberlakukan untuk mencegah serbuan api di hutan.

Tabel berikut memberikan monitoring diperlukan untuk rekomendasi pengelola khusus yang dijelaskan di atas.

Tabel 13 Model Monitoring untuk NKT 4.3

Tindakan yang harus diambil	Apa yang perlu diawasi	Bagaimana memantaunya?	Siapa yang akan bertanggung jawab? Kapan mereka akan melakukannya?	Bagaimana orang yang bertanggung jawab akan melaporkan temuan mereka.
Pembuatan sekat bakar/hutan penyangga	Batasan penyangga api	Survei "spot-check" hasil dari Tim Produksi dan penebangan dan forest fire unit	Tim lingkungan dan tim forest fire tahunan	Laporan disampaikan kepada manager District dan pelatihan diberikan lagi kepada tim produksi bila perlu
Mengoptimalkan kelompok Masyarakat Peduli Api	Efektifitas kelompok masyarakat peduli api	Survei "spot-check" hasil dari Tim Produksi dan penebangan dan forest fire unit	Tim lingkungan dan tim forest fire tahunan	Laporan disampaikan kepada manager District dan pelatihan diberikan lagi kepada tim produksi bila perlu

NKT 5 –Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal

Pemilihan desa/Kampung berdasarkan pada :

- Konektifitas wilayah adat masyarakat lokal/desa sekitar dengan areal konsesi
- Konektifitas wilayah desa dengan lansekap areal konsesi
- Keterwakilan kebudayaan/suku yang dominan dalam satu desa

Tabel 14 Desa/Dusun Lokasi Survey NKT 5 dan 6

No	Desa	Kecamatan	Posisi Konsesi Terhadap Desa	Dikunjungi/Tidak
1	Mulya Agung	Lalan	Di sekitar desa	Dikunjungi
2	Madya Mulya	Lalan	Di sekitar desa	Dikunjungi
3	Karya Mukti	Lalan	Di sekitar desa	Dikunjungi
4	Mandala Sari	Lalan	Di dalam desa	Dikunjungi

!

5	Mekar Sari	Lalan	Di sekitar desa	Dikunjungi
6	Ringin Agung	Lalan	Di sekitar Desa	Dikunjungi

Identifikasi NKT 5

NKT	Pertanyaan Kunci	Temuan
5	Adakah sumberdaya alam (diperoleh dari kawasan di dalam dan sekitar wilayah konsesi) untuk memenuhi kebutuhan-dasar komunitas –yang penting-tidak tergantung-dan dikelola lestari oleh komunitas?	Ada

Untuk mengevaluasi kebutuhan dasar yang memenuhi kriteria NKT 5, maka diterapkan kriteria untuk persentase kebutuhan yang diambil dari sumber daya hutan, ketersediaan alternatif, dan pengelolaan berkesinambungan. Tabel 15 menyajikan ringkasan temuan.

Tabel 15. Identifikasi NKT-5

SUMBERDAYA ALAM POTENSIAL	ATRIBUT	TINGKAT KETERGANTUNGAN >50% (YA/TIDAK)	ALTERNATIF PENGGANTI (YA/TIDAK/MUNGKIN)	DIKELOLA LESTARI (YA/TIDAK/MUNGKIN)	NKT-5 (YA/TIDAK)
LAHAN	Kebun	Ya	Tidak Luas wilayah desa sudah jelas batas-batasnya. Kalau warga mau menambah lahan, ia harus membeli dari orang lain atau membuka lahan di luar desa.	Ya Masyarakat membuka lahan untuk langsung diolah dan ditanami secara intensif.	Ya
LAHAN	Sawah tadah hujan	Ya	Tidak Luas wilayah desa sudah jelas batas-batasnya. Kalau warga mau menambah lahan, ia harus membeli dari orang lain	Ya Masyarakat membuka lahan untuk langsung diolah dan ditanami secara intensif.	Ya

!

!

			atau membuka lahan di luar desa.		
LAHAN	Tambak	Ya	Tidak Lahan yang tersedia dan cocok untuk membuka tambak baru terbatas	Ya Di Kampung Nelayan, Ringin Agung, masyarakat nya membuat tambak dan dikelola secara intensif.	Ya
BAHAN BANGUNAN	Daun nipah	Ya	Tidak Karena warga pengguna nipah lebih nyaman menggunakan nipah dan beberapa warga menggunakan nipah karena hanya mampu beli nipah	Ya hanya mengambil daun nipah yang tua dan lebar	Ya
SUMBER PENDAPATAN LANGSUNG	Ikan Kerapu, sembilang, udang, kakap, betutu	Ya	Tidak Warga mengandalkan pendapatan tunainya hanya dari menangkap ikan di S. Sembilang	Ya Cara menangkap ikannya dengan jala, jaring dan pancing Orang lain (bukan warga ringin agung) ada yg mencari ikan dengan racun	Ya
SUMBER PROTEIN	Ikan Kakap, Kerapu, Sembilang, udang	Ya	Ya Tahu, tempe, telur, ayam, menthok, Tetapi warga harus membeli alternatif pengganti tersebut. Untuk beberapa warga di kampung nelayan, tidak mampu untuk membeli.	Ya Mencari dengan pancing, jaring (tdk dg alat-alat yg merusak lingkungan)	Ya

!

DelineasiKBKT/KPNKT 5

Tabel 16. Delineasi NKT-5

NKT 5 Teridentifikasi	Lokasi (Titik Koordinat)	Luas Lokasi	Keterangan (habitat/ekosistem/lanskap)
SUMBER PROTEIN Ikan sungai	Desa Ringin Agung 2.2306 ⁰ S 104.4748 ⁰ E	Sepanjang sungai lalan	Habitat ikan sungai
	Desa Mandala Sari 2.2705 ⁰ S 104.4198 ⁰ E	Sepanjang sungai lalan	Habitat ikan sungai
BAHAN BANGUNAN Atap: daun nipah	Desa Mulya Agung 2.2666 ⁰ S 104.5399 ⁰ E	Sepanjang sungai lalan	pinggir Ekosistem sungai
	Desa Karya Mukti 2.244 ⁰ S 104.5193 ⁰ E	Sepanjang sungai lalan	pinggir Ekosistem sungai
	Desa Madya Mulya 2.2828 ⁰ S 104.5513 ⁰ E	Sepanjang sungai lalan	pinggir Ekosistem sungai
	Desa Mekar Sari 2.2547 ⁰ S 104.4497 ⁰ E	Sepanjang sungai lalan	pinggir Ekosistem sungai
	Desa Ringin Agung 2.2306 ⁰ S 104.4748 ⁰ E	Sepanjang sungai lalan	pinggir Ekosistem sungai
	Desa Mandala Sari 2.2705 ⁰ S 104.4198 ⁰ E	Sepanjang sungai lalan	pinggir Ekosistem sungai
SUMBER PENDAPATAN LANGSUNG Madu Hutan	Desa Ringin Agung 2.2306 ⁰ S 104.4748 ⁰ E	Hutan sekitar desa	Habitat lebah madu
SUMBER PENDAPATAN LANGSUNG Ikan	Desa Ringin Agung 2.2306 ⁰ S 104.4748 ⁰ E	Sepanjang sungai lalan	Habitat ikan sungai
LAHAN UNTUK SAWAH/LADANG/TAMBAK (SUBSISTEN) Lahan untuk tambak, kebun dan sawah	Desa Ringin Agung 2.2306 ⁰ S 104.4748 ⁰ E	Daerah tambak sekitar desa, daerah persawahan dan kebun sekitar desa	Habitat ikan tambak, ekosistem sawah dan kebun

!

Ancaman Terhadap NKT 5

Ancaman yang mungkin berdampak terhadap kawasan NKT 5 adalah sebagai berikut:

- Pembukaan hutan-berdampak RENDAH
- Masuknya air asin di area persawahan/perkebunan – berdampak TINGGI
- Penurunan kualitas air di Sungai Sembilang – berdampak TINGGI
- Penurunan ketersediaan nipah –berdampak RENDAH

Tujuan Pengelolaan NKT 5

Tujuan Pengelolaan NKT adalah kontrol pengelolaan dalam KBKT agar tidak berdampak negatif terhadap penghidupan masyarakat yang didukung oleh NKT tersebut. Supaya pelestarian sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, agar tidak terjadi kesulitan dalam aspek-aspek penghidupan yang didukung NKT tersebut.

NKT	TUJUAN
Air Sungai Sembilang untuk lahan tambak	Mempertahankan kualitas air di Sungai Sembilang supaya masih bisa untuk memelihara bandeng dan udang
Sumber pendapatan tunai (Ikan dan udang)	Mempertahankan dan meningkatkan jumlah udang dan ikan
Sumber Pendapatan Tunai (Daun Nipah)	Mempertahankan ketersediaan daun nipah
Lahan untuk berkebun	Ketersediaan lahan dan alteratif pengolahan kebun

Rekomendasi Pengelolaan NKT 5

Tabel 17. Pengelolaan dan Rekomendasi khusus untuk Pemantauan NKT 5

Rekomendasi Pengelolaan	Catatan pengelolaan	Kebutuhan Dasar NKT 5 yang Dicakup
penelitian lebih lanjut terhadap penyebab turunnya air sungai yg melibatkan up dan masyarakat, pengaturan pembuangan air dari up (pembukaan pintu kanal	penghidupan nelayan tangkap dan tambak yang makin sulit dapat memicu munculnya berbagai masalah sosial yg dapat mempengaruhi operasional perusahaan	Air Sungai Sembilang sebagai lahan untuk tambak dan ikan sebagai sumber pendapatan utama

!

!

Rekomendasi Pengelolaan	Catatan pengelolaan	Kebutuhan Dasar NKT 5 yang Dicapuk
memperhatikan kondisi lingkungan		
bekerja sama dengan aparat pemerintah dan up untuk membuat hutan tanaman rakyat	bertambahnya jumlah penduduk yg memerlukan lahan untuk kehidupan, tidak berimbang dgn jumlah lahan yg mendorong terjadinya perambahan wilyah dan masalah lain sekitar lahan	Lahan untuk berkebun
bekerja sama dengan instansi terkait untuk penutupan tanggul sungai	saat air pasang, air sungai masuk sampai ke pemukiman dan sawah penduduk akibat dari terbukannya tanggul sungai	Lahan untuk berkebun
Pengaturan pengambilan nipah bersama masyarakat	pengambilan secara masif oleh luar lahan memungkinkan terjadinya kerusakan habitat dan ekosistem nipah	Daun nipah

Rekomendasi Pemantauan NKT 5

Pemantauan Kebutuhan Dasar

Sumber daya yang digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat umumnya dicakup di bawah NKT lainnya, tetapi Pemantauan kebutuhan dasar ini harus diterapkan tahunan pada seluruh desa di dalam dan di sekitar konsesi melalui wawancara partisipatif dan kunjungan lapangan.

Tim Community Development (CD) PT TPJ bersama LSM lokal dapat menjalankan tugas ini. Informasi yang terutama penting untuk tujuan Pemantauan adalah kecenderungan pada kebutuhan dasar akan sumber daya alam, dan penyebab kenaikan atau penurunan yang terdokumentasi. Apabila penyebab penurunan langsung disebabkan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, pengelolaan remedial harus diterapkan untuk memperbaiki penyebabnya.

Pemantauan Rekomendasi Pengelolaan Khusus untuk NKT 5

Tabel 18 berikut menjelaskan kebutuhan Pemantauan untuk Rekomendasi Pengelolaan spesifik yang digambarkan di atas.

!

Tabel 18. Model Pemantauan Untuk Pemeliharaan Kawasan Yang Penting Bagi Kebutuhan Dasar Masyarakat.

Tindakan yang harus diambil	Apa yang perlu diawasi	Bagaimana memantaunya?	Siapa yang akan bertanggung jawab? Kapan mereka akan melakukannya?	Bagaimana orang yang bertanggung jawab akan melaporkan temuan mereka?
<p>a. penelitian lebih lanjut terhadap penyebab turunnya air sungai yg melibatkan UP dan masyarakat, pengaturan</p> <p>b. pembuangan air dari up (pembukaan pintu kanal memperhatikan kondisi lingkungan</p>	<p>Air sungai sembilang, air yang keluar dari kanal UP</p>	<p>pemantauan kualitas air sungai</p>	<p>UP dan Kelompok Nelayan melakukan pemantauan kualitas air setiap 6 bulan</p>	<p>Temuan pemantauan air setiap 6 bulan akan diberikan ke Distrik Manager</p>
<p>bekerja sama dengan aparat pemerintah dan UP untuk membuat hutan tanaman rakyat</p>	<p>Operasional Hutan Tanaman Rakyat</p>	<p>Ada SOP untuk mengelola Hutan Tanaman Rakyat</p>	<p>Membentuk pokja hutan tanaman rakyat yang terdiri dari aparat desa dan masyarakat, pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program</p>	<p>Dilaporkan di bagian kemitraan UP dan Distrik Manager UP</p>
<p>bekerja sama dengan instansi terkait untuk penutupan tanggul sungai</p>	<p>Tanggul Sungai</p>	<p>Ada jadwal monitoring</p>	<p>1. UP 2. Pemerintah (bagian PU)</p> <p>Kapan: Sesuai dengan jadwal monitoring</p>	
<p>Pengaturan pengambilan nipah bersama masyarakat</p>	<p>Kuota Pengambilan Nipah</p>	<p>Pengaturan pengambilan nipah bersama masyarakat</p>	<p>UP untuk tanaman nipah yang ada di DAS konsesi</p>	

!

NKT 6 - IDENTITAS BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT LOKAL

Identifikasi NKT 6

NKT	Pertanyaan Kunci	Temuan
6	Adakah sumberdaya alam/ benda/ lokasi/ tanda alam (didalam dan sekitar kawasan konsesi) yang menjadi/terkait dengan identitas budaya tradisional komunitas?	Tidak ada

!